

DAFTAR RUJUKAN

BUKU :

- Arief, B. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Bandung: Kencana Persada Media.
- Donnelly, Jack. 2018. Konsep Mengenai Hak - Hak asasi Manusia, Dalam Hak – Hak asasi manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), filsafat hukum dan filsafat politik. Maumere:Ledalero.
- Kurnisar. 2017. “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia.” Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik
- Lamintang. P.A.F. (2019). Hukum Penitensier Indonesia, Ed 2.
- Maulidah, H. J. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim dalam Upaya pembaharuan hukum pidana nasional. 281-293.
- Mukti Fajar ND, Y. A. (2013). Dualisme Penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Jakarta.
- Mulyatno. (2013). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2015). Bab - Bab tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Purba, N. (2020). Death Penalty and Human Rights in Indonesia. International Journal Criminology and Sociology, 1359.
- Purba, N. (2020). Death Penalty Human Right in Indonesia. International Journal Criminology and Sociology, 1360.
- Purnomo, Bambang Sugeng. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di tinjau dari Perpektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Putra, R. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Diponegoro Law Journal.
- Sadya, S. (2023). Semakin Banyak Negara yang Hapus Hukuman Mati di Dunia.
- Sambas, N. (2017). Penerapan Pidana mari Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta. Bandung.
- Tim Pustaka Buana, Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP, (Bandung: Pustaka Buana, 2016)

Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.. Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Wiyono, P. (2022). Hukuman Mati dan HAM.

Yahya, Imam. 2013. "Hukuman Mati Dalam Perspektif Sejarah"

Yusuf, H. (2016). Sanksi Hukuman Mati Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

JURNAL / ARTIKEL:

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, R., "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1, No. 1, 2016

Ajie Ramdan. 2018. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham." Arena Hukum 11 (3): 600–617. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.

Anjari, Warih. 2015, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Yustisia, 1 (2).

BBC. 2018. "Negara Yang Masih Mempertahankan Pidana Mati." Bbc. 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508>.

Dheey. (2020). Retrieved from Perbedaan Hukuman mati dan hukuman seumur hidup: <https://id.quora.com/Apa-perbedaan-antara-hukuman-mati-dan-hukuman-seumur-hidup>

Ferawati. 2015. "Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika." Jurnal Ilmu Hukum 4 (3): 138–50.

Harruma, I. (2022, April). Retrieved from Pro Kontra Hukuman Mati: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hkuman-mati>

H. Asmu'i Syarkow (2020), "Hukuman Mati dan Konsep Diat", <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/604-hukuman-mati-dan-konsep-diat>

ICJR. (2023). laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2022. Jakarta: institute for criminal justice reform.

Indonesia, A. I. (2022, May). Retrieved from Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan: <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>

- Januario,Eka,Gregorius. 2023.“Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat”, Jurnal Ilmu Sosial.Volume 1.Nomor 1.
- Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform : Muddling Towards DEMOCRACY . Public Law in East Asia.
- Nabila, A. Z. (2023, Februari 15). Retrieved from Ini Perbedaan Hukuman Mati dan Seumur Hidup, Jangan Keliru: <https://news.indozone.id/news/911585737/ini-perbedaan-hukuman-mati-dan-seumur-hidup-jangan-keliru->
- Nafiatul Munawaroh. (2023). Alasan Penundaan Eksekusi Mati. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-alasan-penundaan-eksekusi-pidana-mati-lt53df2c50e4980>
- Nata Sukam Bangun,2017, Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia. Volume 5. Nomor 3.
- Ningrum, D.K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Bidang Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara. *Law Reform*, 12 (2), 209 - 221.
- Nugraha, P. M. M. dalam D. P. (2017). Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia. Cet 1. Thafa Media.
- Puspasari, Setyaningrum, (2023). "Nirbaya, Sisi Kelam Lokasi Eksekusi Hukuman Mati di Nusakambangan", <https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/163636378/nirbaya-sisi-kelam-lokasi-eksekusi-hukuman-mati-di-nusakambangan?page=all>.
- Putra, R. S. P., Sularto, R. B., & Hardjanto, U. S. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263–276.
- Rosa Kumalasari. 2016, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. Volume 2. Nomor 1.
- Saptohutomo, A. S. (2022, Desember 18). Retrieved from Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah: <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>
- Suwarko, D. (2018). Pendanaan Terorisme : Pergeseran Politik Hukum Penegahan Dan Pemberantasannya Di Indonesia. Genta Publishing

Tanjung, E. (2021, November 19). Ditolak Pegiat HAM, Jaksa Agung Bersikukuh Terapkan Hukuman Mati Korupto. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2021/11/19/000500/ditolak-pegiat-ham-jaksa-agung-bersikukuh-terapkan-hukuman-mati-koruptor?page=all>

Veive Large Hamenda. 2013, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Volume 2. Nomor 1

Widayat, L. S. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. Jurnal Negara Hukum

PERATURAN UNDANG - UNDANG :

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti, (Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 730).

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tentang Kasasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Abolisi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46340).

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar 1945

Penetapan Presiden No.2 Tahun 1945 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

TAP MPR NO XVII Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati